



BUPATI BOGOR

KEPUTUSAN BUPATI BOGOR

Nomor : 050/53/Kpts/Per-UU/2015.
Lampiran : 1 (satu) berkas

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Bupati Bogor wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Bupati Bogor tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Bogor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang

Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 24 seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Provinsi Jawa Barat 87);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 46);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 25 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 159);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 200 Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 37);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Nomor 12 Tahun 2008);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 36);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 27 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 27);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 37);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2014 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Bogor sebagaimana tercantum pada Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan pedoman dalam :
- a. penetapan Rencana Kinerja Tahunan;
 - b. penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran;
 - c. penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja;
 - d. penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; dan
 - e. pelaksanaan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cibinong

Pada Tanggal : 15 Januari 2015



NO	SASARAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	2014	2015	2016	2017	2018	KONDISI AKHIR	SKPD PENGAMPU	KETERANGAN
Misi Kedua: Meningkatkan daya saing perekonomian masyarakat dan pengembangan usaha berbasis sumberdaya alam dan pariwisata											
1	Meningkatnya produksi, distribusi, dan konsumsi pangan daerah	Produksi benih ikan hias dan benih ikan konsumsi air tawar termasuk terbanyak di Indonesia	(RE)	3.084.614	3.206.528	3.713.003	4.366.638	5.239.966	5239966	DISNAKKAN, BKP5K	PENCIRI TERMAJU
		Tercapainya swasembada benih padi unggul Bersertifikat	(%)	10,09	19,91	46,45	72,99	100,32	100,32	DISTANHUT, BKP5K	PENCIRI TERMAJU
2	Meningkatnya jumlah koperasi aktif dan kemandirian usaha mikro, kecil dan menengah dalam mengembangkan ekonomi lokal	Persentase koperasi aktif	%	0,6823	0,686	0,6896	0,6909	0,6944	0,6944	DISKOPUKMINDAG	
		Usaha Mikro dan Kecil	%	0,878	0,8797	0,8822	0,8854	0,8892	0,8892	DISKOPUKMINDAG	
		Terbangunnya pasar disetiap kecamatan								DISKOPUKMINDAG	PENCIRI TERMAJU
		- Pasar Kabupaten	(kec)	0	0	1	1	1	26		
		- Pasar Desa	(kec)	2	2	1	1	1	31		
3	Meningkatnya investasi dan laju pertumbuhan investasi	LPE melebihi LPE Provinsi dan Nasional	(%)	5.20 - 6.50	5.20 - 6.50	5.20 - 6.50	5.20 - 6.50	5.20 - 6.50	5.20 - 6.50	SELURUH SKPD	PENCIRI TERMAJU
		PDRB harga berlaku termasuk tertinggi di Indonesia	(Rp. trilyun)	110 - 130	110 - 140	110 - 150	110 - 160	110 - 170	110 - 170	SELURUH SKPD	PENCIRI TERMAJU
4	Meningkatnya cakupan pemenuhan kebutuhan listrik	Pelayanan Penyediaan Listrik Perdesaan tertinggi di Indonesia	(% RE)	83,25	83,98	84,71	85,44	89,62	89,62	DESDM	PENCIRI TERMAJU
5	Berkembangnya pariwisata andalan disertai dengan meningkatnya kunjungan wisata	Kunjungan Wisatawan termasuk tertinggi di Indonesia	(org)	4537643	4991407	5490548	6039603	6643563	6643563	DISBUDPAR	PENCIRI TERMAJU
6	Meningkatnya jumlah dan kemandirian industri kecil dan menengah dalam mengembangkan ekonomi lokal	Pertumbuhan industri	%	0,0361	0,0349	0,0389	0,0399	0,0408	0,0408	DISKOPUKMINDAG	
7	Meningkatnya partisipasi angkatan kerja dan kesejahteraan tenaga kerja	Tingkat partisipasi angkatan kerja	%	65,8	65,85	65,9	65,95	66	66	DINSOSNAKERTRANS	
Misi Ketiga: Meningkatkan integrasi, konektivitas, kualitas dan kuantitas infrastruktur wilayah dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan											
1	Meningkatnya perencanaan, kesesuaian dan pengendalian pemanfaatan ruang	Ketaatan terhadap RTRW	%	86	86,5	87	87,5	88	88	DTRP	
2	Meningkatnya infrastruktur jalan/jembatan yang berkualitas dan terintegrasi untuk mendukung pergerakan orang, barang dan jasa	Terbangunnya pembangunan Poros Barat - Utara - Tengah - Timur								DBMP. SETDA	PENCIRI TERMAJU
		Poros Tengah - Timur	km	0	10,4	24	12,8	0	50,2		
		Poros Utara									
		- Jalur cepat	km	0	2,5	1,5	3	0,6	7,6		
		- Jalur lambat	km	0	2,5	1,5	3	0,6	8,1		

NO	SASARAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	2014	2015	2016	2017	2018	KONDISI AKHIR	SKPD PENGAMPU	KETERANGAN
		Poros Barat	km	0,8	0	0	0	0	3,4		
3	Meningkatnya infrastruktur perhubungan yang mendukung aksesibilitas, pergerakan orang, barang dan jasa	Mendorong Terbangunnya Cibinong Raya sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)								BAPPEDA, DTBP, DTRP, DLLAJ, BLH, DESDM	PENCIRI TERMAJU
		- RTRW	(dok)	1	0	0	0	0	2		
		- RTBL	(dok)	1	2	2	4	3	13		
		- RDTR	(dok)	1	0	0	0	0	2		
		- CBO	(dok)	0	0	0	0	0	1		
		Tidak ada daerah terisolir	(kp)	0	1	13	13	0	27	DBMP, DLLAJ	PENCIRI TERMAJU
4	Meningkatnya penyediaan dan penataan perumahan dan permukiman kumuh	Bebas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	(unit)	34623	47623	60623	74623	83982	83982	DTBP, BPMPD	PENCIRI TERMAJU
5	Meningkatnya penyediaan sarana dan prasarana dasar permukiman yang berkualitas	Persentase luas permukiman yang tertata	%	8,034%	8,044%	8,053%	8,062%	8,072%	8,072%	DTBP	
Misi Keempat: Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan pelayanan kesehatan											
1	Meningkatnya partisipasi pendidikan masyarakat	Tercapainya Rata-rata lama sekolah (RLS) 9 tahun	(tahun)	8,23	8,42	8,62	8,81	9	9	DISDIK	PENCIRI TERMAJU
2	Tuntasnya masyarakat tuna aksara	Tuntas AMH bagi penduduk usia 15 - 60 tahun	(jiwa)	15000	22000	22000	22000	20291	3169198	DISDIK, KAPD	PENCIRI TERMAJU
3	Meningkatnya sarana dan prasarana kesehatan baik layanan dasar maupun rujukan	Seluruh RSUD dan PUSKESMAS terakreditasi								DINKES, RSUD	PENCIRI TERMAJU
		- RSUD	(unit)	0	0	1	0	0	4		
		- Puskesmas	(unit)	0	20	20	30	31	101		
4	Terselenggaranya jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin, rentan miskin dan masyarakat yang tenaganya dibutuhkan oleh pmda	Seluruh Masyarakat memiliki Jaminan Kesehatan	(%)	39,4	55	70	85	100	100	DINKES	PENCIRI TERMAJU
5	Meningkatnya kesadaran perilaku hidup bersih dan sehat	AHH termasuk tertinggi di Indonesia	(tahun)	70,4	70,8	71,2	71,6	72	72	DINKES	PENCIRI TERMAJU
Misi Kelima: Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan kerjasama antar daerah dalam kerangka tatakelola pemerintahan yang baik											
1	Meningkatnya kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan	PAD termasuk tertinggi di Indonesia	(Rp.)	1.363.996.369.000	2.005.730.914.367	2.115.168.771.984	2.245.339.735.835	2.349.272.823.337	2.349.272.823.337	DISPENDA	PENCIRI TERMAJU
2	Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil;	Seluruh masyarakat mempunyai KTPel	(org) (%)	2.823.459 82	2.975.010 86	3.145.609 91	3.476.797 100	342.797 100	342.797 100	DISDUKCAPIL	PENCIRI TERMAJU
3	Meningkatnya pelayanan perizinan yang sesuai dengan ketentuan, cepat dan terjangkau masyarakat	Pelayanan Perijinan berstandar ISO	(jenis)	28	35	42	49	58	58	BPT	PENCIRI TERMAJU
4	Meningkatnya kinerja pelayanan kecamatan Meningkatkan kinerja	Tersedianya layanan pengaduan masyarakat di								DISKOMINFO	PENCIRI TERMAJU

NO	SASARAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	2014	2015	2016	2017	2018	KONDISI AKHIR	SKPD PENGAMPU	KETERANGAN
	penyelenggaraan pemerintahan desa	seluruh OPD dan Desa/ Kelurahan									
		- OPD	SKPD	10	38	38	38	38	38		
		- Kecamatan	KEC	0	40	40	40	40	40		
		- Kelurahan	KEL	0	19	19	19	19	19		
		- Desa	DESA	0	416	416	416	416	416		
5	Meningkatnya akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Bogor	Mencapai predikat Wajar tanpa pengecualian (WTP)								DPKBD, INSPEKTORAT	PENCIRI TERMAJU
		- Tertib administrasi dan dokumen pengelolaan keuangan daerah	(%)	100	100	100	100	100	100		
		- Tertib administrasi dan dokumen pengelolaan barang daerah	(%)	100	100	100	100	100	100		
		-Tindak lanjut hasil pengawasan	(%)	100	100	100	100	100	100		
6	Tersedianya informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan yang mudah diakses oleh masyarakat	Terbangunnya sistem informasi manajemen pemerintah Daerah	(SKPD)	31	80	80	80	80	80	DISKOMINFO	PENCIRI TERMAJU
7	Terwujudnya kehidupan politik yang demokratis	Kegiatan pembinaan politik daerah	KEGIATAN	5	5	5	5	5	25	KANKESBANGPOL	
8	Terlindunginya masyarakat dari gangguan keamanan, kenyamanan, ketentraman dan ketertiban	Angka kriminalitas yang tertangani	%	4,25	4,89	5,63	6,47	7,44	7,44	SATPOL PP	



